

**PERMODELAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
BERBASIS KONSERVASI SUMBERDAYA LAHAN DARI ASPEK
KELAS KEMAMPUAN LAHAN**

Sukisno, K. S. Hindarto, dan A.H. Wicaksono

ABSTRACT

This research was conducted to classified land capability and identified unexpected land use for modeling of regional development based on land conservation. Survey method was used to collected primery data and overlay with Arcview 3.3. was conducted to analysis thematic map data. The result show that regional development in Lebong Regency should be conducted with focus on land conservation as based because of 100.483,3 ha (60,37%) it's area on land capability class VI-VIII. The class not suitable for agriculture. It's supported to by land status where 120.565,78 ha (72,24%) of the area decided as conservation area. Unexpected land use was 6.809,24 ha (4,09%) based on land capability class and 6.573,88 ha (3,95%) based on land status. The unexpected land use as agriculture activity affected by social economic factors, not land physics, indicated by unexpected land use 2.292,96 ha (1,38%) on land capability class VI, 923,99 ha (0,56%) class VII dan 3.592,29 ha (2,16%) on class VIII. Land capability class VI-VIII not suitable for agriculture. The land allocation guidelines based on land conservation in Lebong Regency comprise: (1) protected area comprising of 135,84 ha (0.08%) for Protected Area Danau Menghijau, 2.774,82 ha (1.67%) for Protected Area Danau Tes, 16.123,20 ha (9.70%) for Conservation Forest Bukit Daun, and 101.531,92 ha (61.05%) for Kerinci Seblat National Park, (2) cultivated area which consist of 9.759,06 ha (5.87%) for very intensive agriculture, 12.204,73 ha (7.34%) for intensive agriculture, 1.867,26 ha (1.12%) for moderate agriculture, 14.837,64 ha (8.92%) for limited agriculture, 3.277,25 ha (1.97%) for intensive grasslands dan 3.786,24 ha (2.28%) for forests.

Key words: Regional Development, Land Conservation, Land Capability

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan pembangunan wilayah, Lebong di hadapkan pada *trade-off* antara bagaimana memenuhi kebutuhan pembangunan di satu sisi dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan di sisi lain. Kewenangan yang ada memungkinkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan (mengeksplorasi) sumberdaya alam yang ada sebagai modal pembangunan. Semakin besar sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan, semakin besar pajak (pendapatan) yang akan diperoleh sebagai modal pembangunan (Pendapatan Asli Daerah). Akan tetapi Lebong merupakan daerah yang memiliki keterbatasan dalam hal sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan. Wilayah Lebong didominasi oleh

kawasan lindung, yang secara ekonomi belum memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah. Dari 192.324 ha luas wilayah Lebong, 24.437 ha (12,71%) merupakan hutan lindung, 113.512 ha (59%) Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), 3.022 ha (1,60%) suaka alam dan 54.374 ha (28,27%) merupakan pemukiman dan peruntukan lain (Fauzi, 2006; BPS Lebong, 2008).

Kawasan konservasi di Kabupaten Lebong memiliki fungsi yang sangat penting, antara lain sebagai sumber plasma nutfah, ruang hidup bagi masyarakat lokal, penyimpan dan penata air, pereduksi karbon dan penyedia oksigen, sumber energi alternatif, penyimpan sumberdaya mineral, penyeimbang tata ruang wilayah, serta sebagai tempat penelitian, pendidikan dan penerapan iptek. Setidaknya, terdapat dua Daerah Aliran Sungai (DAS) di Lebong, yaitu DAS Seblat dan DAS Ketahun. DAS Ketahun, dengan sungai utamanya Sungai Ketahun, merupakan sumber pasokan air bagi PLTA Tes yang sangat penting bagi pasokan energi listrik di Bengkulu (BPDAS Ketahun, 2007).

Dengan minimnya luas kawasan yang dapat dibudidayakan (28,27%) serta tingkat kemandirian yang masih rendah dalam penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah Lebong dituntut untuk lebih kreatif dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu pertanyaan yang mesti dijawab oleh Pemerintah Lebong adalah bagaimana menjadikan keberadaan kawasan konservasi yang ada sebagai kekuatan pembangunan, bukan sebagai faktor pembatas, sebagaimana kesan yang selama ini ada. Dominasi kawasan lindung, dengan berbagai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan potensi, sekaligus keunikan dan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Berkembangnya wacana pembentukan Kabupaten Lebong sebagai Kabupaten Konservasi, yang menjadikan konservasi sumberdaya alam sebagai basis pengembangan wilayahnya, merupakan salah satu upaya positif yang perlu mendapat apresiasi semua pihak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi dengan membangun suatu model pengembangan wilayah berbasis konservasi sumberdaya lahan (Tim Kecil Kabupaten Konservasi, 2006)

Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan kelas kemampuan lahan dan mengidentifikasi penyimpangan penggunaan lahan sebagai dasar dari permodelan pengembangan wilayah berbasis konservasi sumberdaya lahan di Kabupaten Lebong.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dari Bulan April 2009 hingga November 2009. Penelitian menggunakan metode survei. Tahapan survei meliputi pra survei, survei, dan analisis dan interpretasi hasil survei. Pada tahap pra survei, dilakukan pengumpulan data sekunder, pembuatan peta kerja, pengurusan perizinan, dan persiapan alat dan bahan kelengkapan pelaksanaan survei.

Pada tahap survei dilakukan identifikasi karakteristik fisik wilayah meliputi identifikasi penggunaan lahan, lereng, topografi, koordinat lokasi, dan sifat-sifat tanah lainnya. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel tanah pada setiap horizon tanah yang ada. Analisis sampel tanah dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.

Selanjutnya, data ditabulasi dan disusun berdasarkan tematiknya untuk memudahkan interpretasi. Analisis kelas kemampuan lahan dilakukan dengan melakukan *matching* (pencocokan) kriteria kelas kemampuan lahan dengan data karakteristik tanahdan (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007). Selanjutnya kelas kemampuan lahan digambarkan dalam peta kelas kemampuan lahan. Kondisi status kawasan diperoleh dengan *overlapping* peta penunjukan kawasan hutan provinsi (SK No. 420/Kpts-II/1999) dengan peta administrasi wilayah Lebong. *Overlay* peta kelas kemampuan lahan dan status kawasan dengan penggunaan lahan eksisting menghasilkan peta penyimpangan penggunaan lahan. Arahkan pemanfaatan ruang berbasis konservasi sumberdaya lahan dibuat dengan memadukan peta kelas kemampuan lahan dan peta status kawasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geobiofisik Wilayah Kajian

Kabupaten Lebong merupakan salah satu dari beberapa kabupaten di Indonesia yang mencanangkan diri sebagai kabupaten konservasi. Kabupaten

konservasi merupakan daerah otonom yang yang menyelenggarakan pembangunan berlandaskan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, pemanfaatan berkelanjutan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu. Keinginan Lebong menjadi kabupaten konservasi didukung oleh kondisi fisik wilayah Lebong yang memang sangat sesuai untuk menjadi kabupaten konservasi. Kondisi fisik wilayah dimaksud meliputi sebaran bentuk lahan (*landform*), batuan, topografi/ketinggian, lereng, jenis tanah, iklim, dan penggunaan lahan.

Tabel 1. Kondisi fisiografi wilayah Lebong

No	Fisiografi	Luas (ha)	Luas (%)
1	Grup Aluvial	12.468,21	7,49
2	Grup Aneka Bentuk	792,14	0,48
3	Grup Pegunungan	121.231,71	72,84
4	Grup Perbukitan	5.555,12	3,34
5	Grup Vulkan	26.398,52	15,86
Total		166.445,71	100,00

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, fisiografi wilayah Lebong terdiri atas 5 kelompok, yaitu Kelompok Aluvial, Kelompok Perbukitan, Kelompok Pegunungan, Kelompok Vulkan, dan Kelompok Aneka Bentuk. Grup *Alluvial* merupakan suatu daerah yang relatif datar sampai berombak, lereng 0-8%, berasal dari endapan muda (*resen/subresen*) hasil dari proses aktivitas air sungai (*Fluvial*) dan atau *Koluvial*. Unit ini terdiri dari Dataran *Aluvial*, Kipas *Alluvial/Koluvial*, Lembah *Aluvial* Tertutup, Terbanan Luas Terisi, Teras Sungai, Jalur Sungai, dan Dataran Banjir. Fisiografi ini dominan terdapat di Kecamatan Lebong Tengah dan Lebong Utara, yaitu di sebelah kiri dan kanan Sungai Ketahun. Luas wilayah berfisiografi *Aluvial* di Kabupaten Lebong adalah 12.468,21 ha (7,59%).

Grup perbukitan merupakan daerah angkatan, lipatan dan patahan yang mengalami proses erosi/denudasi, lereng cukup curam, dengan beda tinggi 50-300 m. Grup ini terdiri dari perbukitan kecil dan perbukitan dengan pola random. Luas Grup Perbukitan di Kabupaten Lebong mencapai 5.555,12 atau 3,96% dari total luas wilayah.

Grup Pegunungan merupakan daerah angkatan/lipatan dan patahan yang mempunyai posisi lebih tinggi dari pada perbukitan, lereng >30% dengan beda tinggi >300 m. Luas Grup Pegunungan di Kabupaten Lebong sekitar 72,09% (121.231,71 ha) dari total luas wilayah. Wilayah berfisiografi pegunungan terluas berada di Kecamatan Lebong Utara, yang sebagian besar merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Grup Vulkan merupakan daerah hasil dari proses aktivitas gunung berapi (volkanik) baik endapan muda maupun endapan tua. Lereng datar sampai melandai dan untuk beberapa unit lahan curam sampai sangat curam. Grup ini terdiri Stratovolkan dan Pegunungan Vulkan, lereng atas, lereng tengah, lereng bawah dan kaki gunung berapi. Luas wilayah berfisiografi ini di Kabupaten Lebong mencapai 26.398,52 ha (15,87%).

Sedangkan Grup Aneka Bentuk merupakan suatu daerah yang memiliki bentuk khusus, di luar bentuk fisiografi yang lain. Daerah ini antara lain berupa tebing sungai yang curam, bekas-bekas longsor dan dasar sungai yang sempit dengan kelerengan bervariasi dari 25% sampai 75%. Luas daerah berfisiografi ini sebesar 792,14 ha (0,49%).

Tabel 2. Kondisi topografi wilayah Lebong

No	Tinggi (mdpl)	Luas (ha)	Luas (%)
1	300 - 400	8.692,91	5,22
2	400-500	6.013,89	3,61
3	500 - 750	27.671,81	16,63
4	750 - 1000	33.100,93	19,89
5	1000 - 1250	31.997,52	19,22
6	1250 – 1500	32.164,76	19,32
7	1500 - 1750	16.274,07	9,78
8	1750 - 2000	8.267,24	4,97
9	> 2000	2.262,57	1,36
Total		166.445,71	100,00

Berdasarkan ketinggian tempat, secara umum, Kabupaten Lebong berada pada ketinggian lebih dari 1000 mdpl (54,65%). Wilayah dengan ketinggian kurang dari 300 mdpl hanya sebesar 0,2% dari luas wilayah Kabupaten Lebong, sedangkan luas total wilayah dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl hanya

sebesar 8,83%. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 2000 mdpl seluas 1,37% (Tabel 2)

Tabel 3 menunjukkan kondisi kelerengan wilayah Lebong. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa Lebong didominasi oleh kondisi wilayah dengan kelerengan lebih dari 45% (sangat curam) seluas 44,52%. Berdasarkan hasil perhitungan, luas wilayah dengan kelerengan <8% (datar sampai bergelombang/berombak) hanya 33.362,70 ha atau 20,04%.

Tabel 3. Kondisi kelerengan wilayah Lebong

KELERENGAN	Luas (ha)	Luas (%)
0-8%	33.362,70	20,04
8-15%	5.888,69	3,54
15-25%	27.178,94	16,33
25-45%	25.915,39	15,57
>45%	74.100,00	44,52
Total	166.445,71	100,00

Keadaan iklim di Kabupaten Lebong, termasuk iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin pasat, kecepatan angin rata-rata 10 km/jam, suhu maksimum 30°C, suhu minimum 22°C, dengan suhu rata-rata 26°C. Kelembapan udara rata-rata 75%, curah hujan tahunan 4.800 mm dengan jumlah hari hujan 220 (BPS Kab. Lebong, 2008). Iklim tropika basah dicirikan oleh kondisi hujan yang terjadi hampir sepanjang tahun, tetapi bulan kering dapat terjadi, serta total curah hujan tahunan >1500 mm.

Secara hidrologis, terdapat dua daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Lebong, yaitu DAS Ketahun seluas 126.301,01 ha (75,88%) dan DAS Seblat seluas 40.144,70 ha (24,12%) dengan Sungai Ketahun dan Sungai Seblat sebagai sungai utamanya. Kedua DAS tersebut bermuara ke Pantai Barat Sumatera (Samudera Hindia), dimana kedua muaranya berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini menunjukkan terdapat keterkaitan fungsi ekologis yang sangat penting antara daerah Lebong dengan Bengkulu Utara.

Berdasarkan Peta Jenis Tanah, diketahui bahwa tanah di Kabupaten Lebong di dominasi oleh tanah ordo Inceptisol dan Ultisols. Terdapat juga ordo tanah Entisols, Oxisols, Alfisols, dan Histosols, namun dalam jumlah yang

sedikit. Inceptisols merupakan tanah dalam perkembangan awal (*immature*), dicirikan dengan adanya perkembangan struktur yang masih lemah. Tanah ini terbentuk pada daerah dengan *landscape* yang ekstrim seperti pada daerah berlereng curam atau lembah. Hal ini sesuai dengan kondisi fisiografi wilayah Lebong yang didominasi oleh bentuk pegunungan dan perbukitan dengan dominasi lereng >45%. Sedangkan tanah Ultisols merupakan jenis tanah yang telah berkembang, dicirikan dengan adanya perkembangan struktur dan peningkatan liat. Tanah Ultisols mempunyai jeluk (kedalaman) tanah yang relatif dalam. Tanah Ultisols memiliki tingkat ketersediaan hara dan KTK rendah, pH sangat masam sampai agak masam, drainase baik dan kejenuhan basa rendah. Pada tingkat *great group*, jenis tanah Inceptisols terdiri dari Dystrandepts, Dystrordepts, Eutrandepts, Eutropepts, Tropaquepts, dan Humitropepts. Sedangkan untuk jenis tanah Ultisols, terdiri dari Hapludults, Haplohumults, dan Kanhaplohumults. Entisols yang terdapat di Lebong terdiri dari Tropofluvents dan Fluvaquents. Sedangkan *great grup* yang lain adalah Hapludoxs untuk Oxisols, Hapludalfs untuk Alfisols, dan Troposaprists untuk jenis tanah Histosols.

Jenis tanah Dystrordepts memiliki drainase baik, kelas tekstur lempung berpasir, kedalaman efektif 101-150 cm, karakteristik kimia seperti kapasitas tukar kation rendah, pH 5,0-5,5, ketersediaan hara P_2O_5 rendah, K_2O rendah, serta berada pada kelerengan 0-45%. Tanah Dystrandepts memiliki drainase yang baik dengan kelas tekstur lempung, pasir, liat dan debu, kedalaman efektif 51 - >150 cm. Karakteristik sifat kimia seperti KTK sedang dengan pH 5,0 - 6,0 dan ketersediaan hara P_2O_5 rendah dan K_2O rendah dan berada pada kelerengan 0-45%. Tanah Hapludults memiliki drainase baik dengan kelas tekstur liat berpasir, kedalaman efektif >150 cm. Karakteristik kimia seperti KTK sedang dengan pH 5,0 - 5,5 dan ketersediaan hara P_2O_5 sedang dan K_2O rendah dan berada pada kelerengan 0-25%. Sedangkan tanah Tropaquepts memiliki drainase baik dengan kelas tekstur liat, kedalaman efektif 101-105 cm. KTK sedang dengan pH 5,0-5,5 dan ketersediaan hara P_2O_5 tinggi dan K_2O rendah dan berada pada kelerengan 0-45%.

Sementara itu, berdasarkan peta geologi dan potensi mineral, diketahui bahwa wilayah Lebong menyimpan potensi energi dan mineral yang cukup

banyak. Keberadaan tambang emas di Kabupaten Lebong telah diketahui dengan baik sejak lama, yakni sejak Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Lebong Tambang dan Tambang Sawah merupakan daerah tambang emas yang hingga saat ini masih diusahakan secara tradisional oleh masyarakat. Keberadaan sumber energi dan mineral, dalam hal ini emas, perak dan mangan, berada di dalam atau berbatasan/berdekatan dengan kawasan lindung. Karenanya, aktivitas penambangan yang dilakukan, membutuhkan perhatian yang serius, sehingga aktivitas yang mungkin dilakukan tidak mengganggu/membahayakan kelestarian sumberdaya alam, terutama kawasan hutan.

Kondisi Wilayah Berdasarkan Kelas Kemampuan Lahan

Lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Sebagai contoh, suatu lahan yang karakteristik tanah, iklim, relief, hidrologi atau kualitas lahannya sesuai untuk pertanian, maka lahan dimanfaatkan untuk pertanian. Klasifikasi kemampuan lahan merupakan suatu proses pengelompokan lahan berdasarkan kemampuannya untuk tujuan penggunaan tertentu. Klasifikasi kemampuan dapat dilakukan secara kualitatif, juga kuantitatif. Dasar yang digunakan adalah peta satuan unit lahan, yang merupakan hasil *overlay* dari berbagai tematik lahan, sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan untuk penggunaan tertentu.

Hasil analisis kelas kemampuan lahan di Kabupaten Lebong menunjukkan bahwa terdapat 7 kelas kemampuan lahan yaitu lahan Kelas I seluas 10.178,15 ha (6,11%), Kelas II seluas 25.001,76 ha (15,02%), Kelas III seluas 3.742,04 ha (2,25%), Kelas IV seluas 27.085,38 ha (16,27%), Kelas VI seluas 26.529,42 ha (15,94%), Kelas VII seluas 15.037,56 ha (9,03%) dan Kelas VIII seluas 58.871,40 ha (35,37%). Lahan Kelas I-IV merupakan lahan yang sesuai/cocok untuk aktivitas pertanian, sedangkan lahan Kelas VI, VII, dan VIII merupakan lahan yang kurang sesuai/tidak cocok untuk aktivitas pertanian dan lebih tepat diperuntukan sebagai kawasan hutan. Hasil *overlay* peta kelas kemampuan lahan dengan kondisi penutupan lahan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Penyimpangan penggunaan lahan berdasarkan kelas kemampuan lahan

No	KELAS	LUAS KAWASAN		PENYIMPANGAN	
		Ha	%	Ha	%
1	I	10.178,15	6,11	0,00	0,00
2	II	25.001,76	15,02	0,00	0,00
3	III	3.742,04	2,25	0,00	0,00
4	IV	27.085,38	16,27	0,00	0,00
5	VI	26.529,42	15,94	2.292,96	1,38
6	VII	15.037,56	9,03	923,99	0,56
7	VIII	58.871,40	35,37	3.592,29	2,16
Total		166.445,71	100,00	6.809,24	4,09

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4, terlihat bahwa luas lahan Kelas VIII mendominasi wilayah Lebong (35,37%), diikuti lahan Kelas IV (16,27%), Kelas VI (15,94%), Kelas II (15,02%), Kelas VII, Kelas I dan Kelas III. Lahan Kelas I-IV merupakan lahan yang memiliki karakteristik lereng datar, berombak, bergelombang dan berbukit, dengan kondisi drainase agak baik, agak buruk, buruk dan sangat buruk. Lahan Kelas VI-VIII memiliki kelerengan agak curam sampai sangat curam serta kondisi erosi berat dan sangat berat. Dengan asumsi bahwa lahan Kelas VI-VIII merupakan lahan yang kurang sesuai untuk aktivitas pertanian dan lebih sesuai untuk kawasan hutan, maka lahan yang sebaiknya menjadi kawasan hutan seluas 100.483,3 ha (60,37%).

Berdasarkan hasil analisis tumpang susun yang dilakukan, terlihat bahwa terjadi penyimpangan penggunaan lahan pada kawasan yang seharusnya menjadi kawasan hutan, penggunaan lahannya berupa ladang dan/atau kebun campuran. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan lahan pada lahan kelas VI seluas 1.322,84 ha (0,79%) sebagai kebun campuran, 881,91 ha (0,53%) ladang, 88,21 ha (0,05%) sawah, dan 60,33 ha (0,04%) semak. Pada lahan kelas VII, terdapat 623,62 ha (0,37%) kebun campuran, 275,38 ha (0,17%) ladang, dan 24,98 ha (0,02%) semak. Sedangkan pada lahan kelas VIII, terdapat 2.257,71 ha (1,36%) kebun campuran, 1.203,74 ha (0,72%) ladang, 13,22 ha (0,01%) lahan terbuka, dan 117,62 ha (0,07%) semak. Total luas penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan kelas kemampuan lahan mencapai 6.809,24 ha (4,09%).

Kondisi Wilayah Berdasarkan Status Kawasan

Status kawasan hutan ditetapkan dengan SK Penunjukan Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Departaemen Kehutanan. Surat Keputusan Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalah SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 420/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu seluas 920.964 hektar (skala 1:250.000).

Berdasarkan SK No. 420/Kpts-II/1999, wilayah hutan di Kabupaten Lebong terdiri dari Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun seluas 16.123,20 ha (9,69%), Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat 101.531,92 ha (61,00%), Cagar Alam Danau Menghijau 135,84 ha (0,08%), Cagar Alam Danau Tes 2.774,82 ha (1,67%) dan Area Peruntukan Lain atau Kawasan Budidaya 45.879,93 ha (27,56%). Luas kawasan lindung mendominasi luas wilayah Lebong (72,44%).

Tabel 5. Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Status Kawasan dan Penyimpangannya

PENGGUNAAN	LUAS KAWASAN		PENYIMPANGAN	
	ha	%	ha	%
CA Danau Menghijau	135,84	0,08	39,47	0,02
CA Danau Tes	2.774,82	1,67	955,58	0,57
HL Bukit Daun	16.123,20	9,69	924,99	0,56
Peruntukan Lain	45.879,93	27,56	0,00	0,00
TNKS	101.531,92	61,00	4.653,84	2,80
TOTAL	166.445,71	100,00	6.573,88	3,95

Hasil overlay peta status kawasan hutan dengan penutupan lahan eksisting menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan penggunaan lahan (Tabel 5). Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya mencapai 6.573,88 ha (3,95%), terdiri dari 39,47 ha (0,02%) pada Cagar Alam Danau Menghijau, 955,58 ha (0,57%) pada Cagar Alam Danau Tes, 924,99 ha (0,56%) pada Hutan Lindung Bukit Daun, dan 4.653,84 ha (2,8%) pada TNKS.

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada kawasan Cagar Alam Danau Menghijau adalah 31,24 ha (0,02%) berupa kebun campuran dan 8,24 ha (0,005%) berupa sawah. Pada kawasan Cagar Alam Danau Tes, terdapat 527,38 ha (0,32%) kebun campuran, 243,87 ha (0,15%) ladang, 155,77

ha (0,08%) sawah, dan 49,93 ha (0,03%) semak. Penggunaan lahan yang tidak sesuai pada kawasan Hutan Lindung Bukit Daun 396,27 ha (0,24%) berupa kebun campuran, 513,26 ha (0,31%) ladang, 13,21 ha (0,01%) lahan terbuka, 0,28 ha (0,0002%) sawah, dan 1,98 ha (0,001%) semak. Sedangkan pada Kawasan TNKS, penggunaan lahan yang tidak sesuai terdiri dari 3.342,96 ha (2,01%) kebun campuran, 1.305,49 ha (0,78%) ladang, 5,40 ha (0,003%) sawah, dan 8,29 ha (0,004%) semak. Luas hutan sekunder secara umum adalah 2,6%.

Kondisi lahan di Kabupaten Lebong berdasarkan kedua sumber data tersebut menunjukkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi, penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya mencapai 6.573,88 ha (3,95%), dan berdasarkan kemampuan lahan 6.809,24 ha (4,09%). Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, baik karena sumber data yang berbeda, proses analisis, maupun faktor lainnya. Terlepas dari perbedaan yang ada, ketiganya menunjukkan permasalahan yang sama yaitu konflik pemanfaatan ruang. Konflik pemanfaatan ruang tersebut telah berlangsung lama, dimana lahan yang seharusnya diperuntukkan sebagai kawasan hutan, eksistingnya berupa ladang, kebun campuran, dan/atau sawah.

Arahan Pemanfaatan Lahan Berbasis Konservasi Sumberdaya Lahan

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang didefinisikan sebagai tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilaksanakan secara sekuensial. Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang. Dengan demikian, rencana tata ruang merupakan dasar bagi pemanfaatan ruang/lahan (Dardak 2008).

Rencana tata ruang berisi rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang dibentuk oleh sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana yang mencakup sistem jaringan transportasi (darat, laut, udara), sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem

jaringan sumberdaya air. Pola pemanfaatan ruang merupakan gambaran alokasi ruang untuk berbagai jenis pemanfaatan lahan yang direncanakan.

Seyogyanya arahan pemanfaatan ruang yang secara umum tertuang dalam rencana tata ruang wilayah, mengakomodir kepentingan lingkungan. Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, telah diatur tentang luasan minimum suatu kawasan yang diperuntukkan sebagai fungsi lindung minimal 30%. Syarat tersebut tentu telah terpenuhi oleh Kabupaten Lebong yang memiliki kawasan konservasi >60%. Dengan luas kawasan konservasi 72,44%, luas kawasan budidaya 27,56%, arahan pemanfaatan ruang di Kabupaten Lebong menjadi sangat penting karena tekanan terhadap kawasan lindung sangat besar. Konflik pemanfaatan ruang/lahan merupakan permasalahan yang cukup krusial.

Selama ini, struktur ruang dan pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah belum mampu menyelesaikan permasalahan konflik pemanfaatan ruang. Berkaitan dengan keinginan Lebong menjadi kabupaten konservasi, keutuhan kawasan konservasi menjadi kriteria penilaian keberhasilan kabupaten konservasi. Oleh karena itu, arahan pemanfaatan ruang yang disusun harus menjamin keberlanjutan kawasan konservasi. Dardak (2008) menyatakan bahwa terdapat tiga mekanisme yang dapat digunakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya. Ketiga mekanisme tersebut adalah rencana detail tata ruang, peraturan zonasi dan mekanisme insentif-disinsentif.

Terkait dengan ketiga mekanisme tersebut, terdapat banyak aspek yang perlu dikaji dalam menyusun arahan pemanfaatan ruang berbasis konservasi sumberdaya lahan. Kabupaten konservasi adalah wilayah administrasi yang menyelenggarakan pembangunan wilayah berlandaskan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, titik awal arahan pemanfaatan ruang berbasis konservasi sumberdaya lahan adalah terjaminnya keutuhan kawasan konservasi. Langkah pertama penyusunan arahan pemanfaatan ruang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap aspek legal kawasan (status hutan) dan aspek daya dukung/fungsi ekologis (kemampuan lahan).

Berdasarkan kajian aspek legal, diketahui bahwa di Kabupaten Lebong terdapat 4 kawasan konservasi, yaitu TNKS, Hutan Lindung Bukit Daun, Cagar Alam Danau Menghijau dan Cagar Alam Danau Tes. Pemisahan kawasan lindung dan budidaya selanjutnya diikuti dengan analisis kelas kemampuan lahan pada kawasan budidaya. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sudah baku karena status kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung tidak boleh dirubah, kecuali dengan persetujuan DPR. Analisis kelas kemampuan lahan pada kawasan lindung sebagai dasar solusi arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang telah mengalami perambahan, dengan menentukan berbagai komoditas yang mungkin dikembangkan. Sedangkan pada kawasan budidaya, arahan pemanfaatan ruang berdasarkan kelas kemampuan lahan dapat berupa untuk lahan pertanian sangat intensif, pertanian intensif, pertanian sedang, pertanian terbatas, penggembalaan intensif, penggembalaan sedang, penggembalaan terbatas dan hutan.

Hasil *overlay* antara status hutan dan kelas kemampuan lahan menunjukkan bahwa terdapat kawasan yang secara status merupakan kawasan lindung, namun masuk ke dalam kelas kemampuan lahan selain kelas VII dan VIII. Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan lindung tidak hanya berdasarkan kelas kemampuan lahan. Karena secara legal kawasan tersebut diperuntukkan sebagai kawasan lindung, walaupun kelas kemampuan lahannya kelas I atau II, peruntukan lahan pada kawasan tersebut harus tetap diarahkan sebagai kawasan lindung.

Sementara itu, lahan pada kawasan budidaya (area peruntukan lain), arahan pemanfaatan ruang didasarkan pada kelas kemampuan lahan, dimana kelas I-IV diarahkan untuk aktivitas pertanian, sedangkan lahan kelas VI-VIII, diarahkan untuk fungsi lindung. Fungsi lindung dimaksud dapat berupa hutan maupun budidaya tanaman tahunan (kayu-kayuan). Hasil analisis kelas kemampuan lahan pada kawasan budidaya menunjukkan bahwa terdapat lahan dengan kelas kemampuan lahan yang tidak sesuai untuk aktivitas pertanian (budidaya), yaitu kelas VI, VII dan VIII. Luas lahan pada kawasan budidaya terdiri dari lahan kelas I seluas 21,34%, Kelas II 26,69%, Kelas III 4,08%, Kelas IV 32,44%, Kelas VI 7,17%, Kelas VII 2,23%, dan Kelas VIII 6,04%.

Kelas kemampuan lahan dapat dijadikan sebagai dasar penggunaan lahan. Penggunaan lahan berdasarkan kelas kemampuan lahan merupakan pemanfaatan lahan yang memperhatikan aspek daya dukung lingkungan. Berdasarkan kelas kemampuan lahannya, penggunaan lahan pada kawasan budidaya di Kabupaten Lebong diarahkan untuk aktivitas pertanian sangat intensif 9.759,06 ha (5.87%), pertanian intensif 12.204,73 ha (7.34%), pertanian sedang 1.867,26 ha (1.12%), pertanian terbatas 14.837,64 ha (8.92%), penggembalaan intensif 3.277,25 ha (1.97%) dan hutan 3.786,24 ha (2.28%). Sedangkan pada kawasan lindung, peruntukan penggunaan lahannya adalah 135,84 ha (0.08%) untuk CA Danau Menghijau, 2.774,82 ha (1.67%) CA Danau Tes, 16.123,20 ha (9.70%) HL Bukit Daun, dan 101.531,92 ha (61.05%) Taman Nasional Kerinci Seblat.

Permasalahan mendasar yang dihadapi Kabupaten Lebong berkaitan dengan pengembangan wilayah berbasis konservasi sumberdaya lahan adalah konflik pemanfaatan ruang. Ruang yang seharusnya dijadikan kawasan lindung, telah mengalami perambahan. Aktivitas masyarakat di dalam kawasan hutan sudah berlangsung sejak lama, sebelum kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penetapan kawasan lindung merampas hak masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Konflik pemanfaatan ruang terus terjadi jika tidak terdapat kesepakatan/negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Arah pemanfaatan ruang yang hanya didasarkan pada aspek legal berupa pemisahan kawasan lindung dan budidaya, tanpa diikuti oleh adanya kebijakan persuasif yang mengakomodasi keinginan masyarakat, tidak menyelesaikan masalah konflik pemanfaatan ruang (Dressler 2006).

KESIMPULAN

1. Perencanaan pengembangan wilayah di Lebong harus memperhatikan aspek konservasi sumberdaya lahan karena berdasarkan hasil analisis kelas kemampuan lahan, diketahui bahwa lebih dari 100.483,3 ha (60,37%) wilayahnya merupakan kawasan yang tidak sesuai untuk aktifitas pertanian (Kelas VI-VIII). Lahan tersebut lebih sesuai untuk kawasan konservasi. Demikian juga berdasarkan status kawasan, lebih dari 72,24% atau 120.565,78 ha merupakan kawasan lindung.

2. Berkaitan dengan penggunaan lahan, telah terjadi konflik pemanfaatan ruang di Kabupaten Lebong dimana lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan telah dimanfaatkan sebagai kebun campuran, ladang, sawah, dan peruntukan lainnya. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya mencapai 6.573,88 ha (3,95%) berdasarkan status kawasan hutan dan 6.809,24 ha (4,09%) berdasarkan kelas kemampuan lahan.
3. Penyimpangan penggunaan lahan lebih dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, bukan faktor fisik lahan. Hal ini ditunjukkan dengan penyimpangan penggunaan lahan seluas 2.292,96 ha (1,38%) pada lahan kelas VI, 923,99 ha (0,56%) pada lahan kelas VII dan 3.592,29 ha (2,16%) pada lahan kelas VIII. Secara fisik, lahan kelas VI-VIII tidak sesuai untuk aktivitas pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- ✓ [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong. 2008. Lebong Dalam Angka Tahun 2007. Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong.
- ✓ Chiras DD, Reganold JP. 2005. *Natural Resource Conservation. Management for A Sustainable Future. 9th Ed.* USA, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- ✓ Dardak AH. 2008. Pemanfaatan Lahan Berbasis Rencana Tata Ruang sebagai Upaya Perwujudan Ruang Hidup yang Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan. Di Dalam: Sitanala Arsyad, Ernan Rustiadi, Editor. *Penyelamatan Tanah, Air, dan Lingkungan*. Indonesia, Jakarta: Crespent Press dan Yayasan Obor Indonesia. hlm 33-46.
- ✓ Dressler WH. 2006. Co-Opting Conservation: Migrant Resource Control and Access o National Park Management in the Philippine Uplands. *Development and Change* 37:401-426.
- ✓ Fauzi A. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Teori dan Aplikasi. Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Utama Pustaka.
- ✓ Hardjowigeno S. dan Widiatmaka. 2007. *Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Tanah*. Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- ✓ Tim Kecil Kabupaten Konservasi. 2006. Buku Kecil Kabupaten Konservasi. Konsep, Kebijakan, Sistem Penilaian Penetapan Kinerja. Tim Kecil Kabupaten Konservasi. CIFOR, DEPDAGRI, IPB, KLH, DEPHUT, WWF.